

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER, EKONOMI KREATIF, DAN
KEWIRAUSAHAAN DALAM BELAJAR AKTIF DI SMK**
**(EDUCATION OF CHARACTER, CREATIVE ECONOMY, AND ENTREPRENEURSHIP
IN ACTIVE LEARNING IN SMK)**

Djuharis Rasul
Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemdikbud
Jln. Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat
e-mail: djuharisr@yahoo.com

Diterima tanggal: 21/12/2012, Dikembalikan untuk revisi tanggal: 31/01/2013, Disetujui tanggal: 01/03/2013

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan bentuk-bentuk implementasi kebijakannya dalam belajar aktif di sekolah. Penelitian diselenggarakan di 20 provinsi yang ditetapkan secara sampel multistage sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah telah memahami kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan, dan ekonomi kreatif dalam pembelajaran aktif di sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan tingkat pemahaman yang bervariasi, yaitu rata-rata 89,27%. Hal ini didukung oleh keberhasilan dalam implementasinya, yaitu pendidikan karakter rata-rata 90,2%, pendidikan kewirausahaan rata-rata 76%; dan pendidikan ekonomi kreatif rata-rata 81,7%.*

Kata kunci: *pendidikan karakter, kewirausahaan dan ekonomi kreatif, belajar aktif, dan sekolah menengah kejuruan*

Abstract: *The aim of this study is to identify and implementation of the model policy regarding the head-masters' understanding of the government's policy on the implementations of character, creative economic, and entrepreneurship educations as well as active learning at Vocational High Schools. The study was conducted in 20 provinces using multistage sampling. The result of the study shows that the head-masters had already understood the government policy on the implementations of character, creative economic and entrepreneurship education, as well as active learning at Vocational High Schools with a great differences of their understanding by its average is 89,27%. However, in terms of the succes of its implementation, which cover character education, entrepreneurship education and creative economic education, its average is 90,2 , 76%, and 81,7% respectively.*

Keywords: *character education, entrepreneurship education, creative economic education, active learning, and senior vocational school.*

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RI No 17, Tahun 2007), yang menginginkan terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, maka Pemerintah menetapkan pendidikan karakter sebagai landasannya. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan melakukan percepatan pembangunan nasional bidang pendidikan melalui penataan ulang

kurikulum sekolah yang dikelompokkan menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah, sehingga mendorong terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan pendidikan kewirausahaan, di antaranya mengembangkan model *link and match* (Anonim, 2010).

Lebih lanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan melakukan penguatan kurikulum melalui penerapan metodologi

pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran untuk kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan secara menyeluruh memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia (Anonim, 2010).

Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) sebagai salah satu unit utama, setiap tahun melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kegiatan di tingkat pusat dilakukan dalam bentuk sarasehan nasional, rapat koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, *trainers of trainee (TOT)* yang melibatkan berbagai unsur dari unit utama Kemdikbud dan unsur pelaksana di lapangan. Adapun di tingkat daerah, Puskurbuk melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan kegiatan Puskurbuk tersebut ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan menyusun kebijakan daerah yang mendukung dan selaras dengan kebijakan tersebut serta dilakukannya bentuk-bentuk pembinaan oleh organisasi profesi seperti kelompok kerja guru (KKG), musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), pengawas di satuan pendidikan, baik secara mandiri maupun melalui program pemerintah daerah yang didanai oleh APBD.

Dari kegiatan bimbingan teknis maupun dari hasil monitoring dan evaluasi Puskurbuk (Puskurbuk, 2011) menunjukkan bahwa kebijakan terkini seperti pengintegrasian pendidikan karakter bangsa hanya berhenti sebatas tertulis di dalam dokumen kurikulum. Hal itu kurang terlihat dalam proses belajar-mengajar secara utuh. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1) Sejauh mana pemahaman kepala sekolah terhadap kebijakan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan belajar aktif?; 2) Bagaimana bentuk kebijakan tersebut diimplementasikan di sekolah. Mengacu pada rumusan masalah tersebut, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) Tingkat pemahaman kepala sekolah terhadap

kebijakan pendidikan karakter, kewirausahaan, dan belajar aktif di SMK, dan 2) Bentuk-bentuk implementasi kebijakan tersebut dengan pendekatan pembelajaran aktif di sekolah.

Kajian Literatur

Pendidikan Karakter

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN, 2003). Fungsi dan tujuan tersebut merupakan gambaran tentang kualitas manusia Indonesia yang diinginkan oleh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan termasuk oleh setiap satuan pendidikan sehingga merupakan dasar dalam pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa, pendidikan ekonomi kreatif, dan pendidikan kewirausahaan.

Ada 2 (dua) makna yang terkandung dalam istilah "Pendidikan Karakter", yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan (UUSPN, 2003). Usaha sadar dan sistematis tersebut perlu dilaksanakan dalam bentuk terencana dengan baik untuk mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki sistem/pola berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa mendatang. Adapun karakter digambarkan sebagai sifat manusia yang banyak tergantung dari faktor pengalaman hidupnya sendiri (wikipedia.org, 2012).

Penjelasan yang sama diungkap dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 yang menyatakan bahwa karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (mengerti nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatritasi dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara

koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan (Pemerintah RI, 2010). Sementara itu, Soedarsono (2008) menyatakan bahwa karakter terbentuk sebagai hasil dari pengaruh pengalaman hidup terhadap hati nurani manusia. Dari penjelasan di atas, maka karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari proses perpaduan antara nurani yang sudah dibawa sejak lahir dengan sejumlah nilai, moral, dan norma yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak dikomunitasnya.

Pendidikan dilaksanakan berdasarkan konteksnya (Hasan, 2010). Yang dimaksud dengan konteks di sini, yaitu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat. Lingkungan sosial dan budaya setempat selain menjadi dasar pengembangan juga merupakan saringan untuk menentukan nilai pendidikan karakter yang akan dikembangkan dan dilaksanakan melalui sistem persekolahan, karena pendidikan selain berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma budaya dan prestasi yang positif di masa lalu juga berfungsi untuk menyaring dan mengembangkan nilai dan norma untuk masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya diharapkan akan terakumulasi menjadi karakter baru bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk tingkat nasional, seluruh kebijakan pengembangan karakter sebaiknya mengakar pada budaya bangsa. Semakin mengakar kebijakan tersebut maka akan semakin kuat pula kecenderungan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, fungsi Pendidikan Karakter yaitu membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila (Pemerintah RI, 2010)

Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

Populasi penduduk Indonesia tahun 2012 sebanyak 251.857.940 jiwa (KPU, 2012),

sementara jumlah pengusaha 1,56 persen dari total penduduk Indonesia. Suatu negara dapat maju kalau minimal punya *entrepreneur* dua persen (Syarief, 2012). Jika negara Indonesia ingin menjadi negara maju, maka jumlah wirausahawan di Indonesia ditingkatkan 0,44 persen atau sebesar 1,108 juta orang. Adapun jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 119,39 juta orang (Muhaimin, 2011). Hal ini menggambarkan bahwa peluang dan persaingan untuk menjadi wirausahawan dari angkatan kerja tersebut masih sangat besar. Disisi lain, jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14% (BPS, 2012). Jumlah terbesar pengangguran terbuka berasal dari tamatan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Banyaknya pengangguran ini akan menjadi beban pemerintah dan juga masyarakat, sehingga dapat menghambat pembangunan nasional. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran yaitu dengan mengembangkan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) sedini mungkin melalui pendidikan.

Pengertian kewirausahaan sangat bervariasi, Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer (dalam Balitbang Kemdiknas, 2010) mengemukakan wirausaha sebagai berikut: "*An entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on those opportunities*". Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses/meningkatkan pendapatan. Meredith (Meredith, 1996) berpendapat *Entrepreneur* adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya dan bertindak tepat untuk memastikan usahanya sukses, ini menggambarkan wirausahawan sebagai individu yang berorientasikan pada

tindakan, bermotivasi tinggi serta berani mengambil resiko dalam mengejar tujuan. Siagian (1995) menyatakan “Kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen”. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif yang tinggi dalam hidupnya. Ilmuwan dalam negeri, Sumahamijaya (dalam Soesarsono, 2002) menyatakan istilah wirausaha berasal dari kata *wiraswasta* yang mengandung arti: 1) *wira* berarti utama, luhur, gagah berani, teladan; 2) *swa* bermakna sendiri; dan 3) *sta* berarti berdiri. Hal ini berarti memiliki sifat-sifat keberanian, keutamaan dan keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Kata ini kemudian berkembang menjadi wirausaha. Kata usaha dalam wirausaha mengandung arti “bisnis” keuntungan berdasarkan kerja produktif, namun kemudian pengertian wirausaha juga mengandung arti “swasta” yang berarti “keberanian, keutamaan dan keteladanan” dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri untuk mencapai keuntungan.

Suryana (2004) menguraikan 6 (enam) hakikat penting kewirausahaan, yaitu: 1) nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis; 2) kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*); 3) proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan; 4) nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*); 5) proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), dan sesuatu yang berbeda (*inovative*) yang bermanfaat memberi nilai lebih; dan 6) usaha menciptakan nilai tambah dengan

jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pengertian tersebut, yaitu bahwa kewirausahaan dipandang sebagai fungsi yang mencakup eksploitasi peluang-peluang yang muncul di pasar serta selalu berani menghadapi resiko untuk memperoleh keuntungan, hal ini sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif.

Semangat atau jiwa kewirausahaan di SMK dibentuk selain melalui mata pelajaran Kewirausahaan juga dikembangkan melalui kelas wirausaha (peserta didik mengembangkan kompetensi produktifnya dengan mencoba menjalankan usaha kecil) (Dir.Pembinaan SMK, 2000). Dengan demikian, kewirausahaan di SMK sebaiknya dilihat sebagai konsep yang lebih luas bukan hanya sesuatu yang berkaitan dengan bisnis atau hanya ditanamkan melalui 1 (satu) mata pelajaran dan kelas wirausaha, tetapi juga sebuah konsep yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui semua mata pelajaran.

Konsep ekonomi yang dianut oleh berbagai negara maju di dunia telah mengalami perubahan. Perubahan ini merupakan suatu hal yang wajar untuk selalu mencari yang terbaik, dengan adanya perubahan ini diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di negara maju tersebut, Alvin Toffler (dalam Departemen Perdagangan RI, 2008) menyatakan telah terjadi perubahan konsep ekonomi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu: 1) ekonomi pertanian; 2) ekonomi industri; 3) ekonomi informasi; dan 4) ekonomi kreatif. Dari pendapat Alvin Toffler dapat disimpulkan bahwa negara maju meninggalkan konsep ekonomi pertanian dan ekonomi industri dan menerapkan konsep ekonomi informasi untuk menuju konsep ekonomi kreatif. Hal ini didukung oleh John Howkin (2002) yang menyatakan

ekonomi kreatif yaitu kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah gagasan yang orisinal, sehingga gagasan tersebut dapat dilindungi dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Semakin banyak gagasan yang tercipta, maka semakin cepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan (Howkins, 2002).

Penerapan konsep ekonomi kreatif telah diantisipasi oleh Pemerintah dengan memfokuskan pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual (Departemen Perdagangan RI, 2008). Diharapkan dengan menerapkan ekonomi kreatif, maka akan menciptakan insan yang kreatif dan mampu untuk menciptakan barang dan jasa yang baru atau menjadi wirausahawan yang mandiri dan mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, Pemerintah menyadari bahwa konsep ekonomi kreatif yang diterapkan sejak pendidikan dasar akan mampu menciptakan insan kreatif dan menghasilkan wirausahawan tangguh yang mempunyai gagasan cemerlang dan baru.

Belajar aktif merupakan suatu pendekatan atau strategi belajar-mengajar yang mengutamakan kegiatan intelektual (*intellectual activity*). Peserta didik tidak hanya menerima apa yang diajarkan, tetapi berperan aktif dalam proses belajar-mengajar. Dengan demikian, peserta didik dapat berfikir aktif, mengajukan pertanyaan, menge-mukakan pendapat, menilai suatu hasil atau membuktikan, dan dapat mencari cara memecahkan masalah (Pusbangkurandik, 1996). Dalam pembelajaran aktif, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik yang mengalami pengalaman belajar secara langsung dengan melakukan sendiri atau mengamati kejadian-kejadian tertentu secara langsung serta berdialog dengan orang lain (diskusi) maupun dengan diri sendiri dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan (Puskurbuk, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian berbasis otak yang menemukan bahwa zat kimia otak (hormon) mempengaruhi jenis kecerdasan yang beranekaragam. Akibatnya, peserta didik akan mudah berpikir untuk menyerap pelajaran jika

peserta didik belajar dalam suasana nyaman. Oleh karena itu, sentuhan kasih sayang, saling memaafkan, saling menghormati, kerja sama antarguru, antarpeserta didik, keceriaan menjadi pemicu perkembangan keutuhan aspek akademik dan nonakademik. Untuk mewujudkan situasi tersebut, maka dalam pembelajaran diperlukan metode pembelajaran aktif (Rahmat, 2007)

Agar lebih tertanam jiwa pada peserta didik, maka proses pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan, dan ekonomi kreatif perlu dilakukan melalui perencanaan yang baik dan pendekatan pembelajaran yang efektif serta dilakukan secara bersama oleh semua warga sekolah, melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran, muatan lokal maupun kegiatan-kegiatan dalam pengembangan diri (Depdiknas, 2006). Dengan demikian, dalam waktu yang lama akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Proses pengembangan nilai-nilai karakter, pendidikan kewirausahaan, dan ekonomi kreatif menghendaki suatu proses yang sistemik dan sistematis. Sistemik dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh jenjang birokrasi yang ada, baik dari tingkat pusat (Kemdikbud), tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, maupun sampai ke tingkat satuan pendidikan, sedangkan sistematis dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang terencana dengan baik melalui berbagai komponen yang ada dalam kurikulum satuan pendidikan.

Strategi Sosialisasi

Ada beberapa strategi/model penyebaran hasil pengembangan kurikulum, di antaranya *The Centre-Periphery Model*, yaitu penyebaran bergerak (dikendalikan) dari titik pusat keluar ke arah pemakainya. Bila model ini diterapkan di Indonesia akan menghadapi kendala karena titik penyebarannya (sekolah-sekolah di daerah) terletak terlalu jauh dari titik pusat (Pemerintah Pusat/Jakarta). Model kedua adalah *The Proliferation of Centres Model*. Model ini membuat tempat penyebaran dapat menjadi sebaik pusat pertama. Pusat pertama hanya memberi bantuan pelatihan dan membantu mengelola pusat kedua (Puskur, 2000). Strategi sosialisasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa,

kewirausahaan, dan ekonomi kreatif dilakukan dengan lebih mempertajam strategi sosialisasi model kedua yang dilakukan secara bertingkat yaitu sebagai berikut.

Tingkat Pusat

Di tingkat pusat, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melakukan: 1) gerakan kolektif pencanangan pendidikan karakter pada semua unit-unit utama; 2) mengembangkan regulasi/payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan pendidikan karakter; 3) menyiapkan satu sistem pelatihan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan; 4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter di setiap unit kerja; dan 5) eksplorasi pengalaman sekolah-sekolah yang telah mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan ciri khas sekolah tersebut. Hal ini, untuk mengetahui darimana dan bagaimana inisiatif untuk mengembangkan nilai pendidikan karakter tersebut bisa muncul di satuan pendidikan tersebut; dan 6) revitalisasi program di tingkat satuan pendidikan untuk menguatkan kembali kegiatan pendidikan karakter yang umumnya dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Tingkat Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pendidikan karakter, karena pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan di satuan pendidikan. Beberapa langkah yang diharapkan untuk dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan karakter, yaitu membentuk tim pengembang kurikulum (Depdiknas, 2007).

Organisasi TPK berkedudukan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud dinamakan TPK Pusat. Di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh dinas pendidikan provinsi dinamakan TPK provinsi. Di tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota yang dinamakan TPK kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya, TPK Pusat bekerja sama dengan kementerian terkait seperti Kemenag, Direktorat Jenderal terkait di lingkungan

Kemdikbud beserta jajarannya seperti P4TK dan LPMP, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan organisasi profesi.

TPK provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan TPK Pusat, P4TK, LPMP, perguruan tinggi (LPTK) setempat, dewan pendidikan, organisasi profesi, komite sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah/madrasah (MKKS/M, musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan kelompok kerja guru (KKG). Mengacu pada peran dan tugas TPK yang dirumuskan Puskur (2005), yaitu sebagai berikut. 1) TPK berperan sebagai pendamping atau fasilitator, mediator, dan inovator. Sebagai pendamping atau fasilitator, TPK berperan memberikan bantuan teknis kepada satuan pendidikan mengenai penyusunan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan; 2) Sebagai mediator, TPK berperan membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan tentang kurikulum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan; 3) Sebagai inovator, TPK berperan mengembangkan, mengkaji, dan mengembangkan model pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan perkembangan daerah/sekolah.

TPK membantu tugas dinas pendidikan untuk: 1) memberikan pelatihan pengembangan kurikulum di daerah dan lembaga pendidikan; 2) menyediakan layanan dan konsultasi kurikulum dan pembelajaran bagi pihak yang membutuhkan; 3) menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum; 4) memberdayakan satuan pendidikan dalam pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum; 5) memberdayakan satuan pendidikan dalam mengembangkan model-model kurikulum dan pembelajaran; dan 6) memberdayakan satuan pendidikan dalam mengembangkan media dan sumber pembelajaran (Puskur, 2005).

Kegiatan penyebaran pendidikan karakter bangsa diharapkan dapat diprogramkan secara terencana dengan baik ke dalam program kegiatan di dinas pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada dalam perencanaan tahunan di berbagai

aspek pendukung, termasuk komponen biaya dan sarana-prasarana.

Tingkat Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan sudah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri (Depdiknas, 2006), sehingga pendidikan karakter dapat menjadi bagian dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. Agar pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara optimal, pendidikan karakter perlu diimplementasikan melalui langkah-langkah berikut: 1) sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga); dan 2) pengembangan dalam kegiatan sekolah. Strategi tersebut diwujudkan melalui pembelajaran aktif dengan penilaian berbasis kelas disertai dengan program remediasi dan pengayaan dalam bentuk kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian, penambahan alokasi waktu khusus, dan pembenahan dalam pengorganisasian proses pembelajaran (BSNP, 2006).

Penyebaran di tingkat pusat dan daerah tersebut, selama ini diharapkan terintegrasi dalam keempat pilar penting pendidikan karakter di sekolah sebagaimana dituangkan dalam Desain Induk Pendidikan Karakter (Puskurbuk, 2010), yaitu: kegiatan pembelajaran di kelas, pengembangan budaya satuan pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler.

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2002). Dalam hal ini, penelitian ini mengupayakan memperoleh jawaban terkait dengan masalah-masalah yang timbul, sikap, pandangan, dan kondisi objektif yang sedang berlangsung tentang penerapan pendidikan karakter, ekonomi kreatif, pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan dengan metoda belajar aktif di sekolah menengah kejuruan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kuantitatif, yang diarahkan

untuk mendiskripsikan gejala-gejala sosial di SMK dengan menggunakan angka-angka. Hasil pengukuran dalam bentuk angka-angka menggambarkan kualitas atau derajat kualitas dari kenyataan dan eksistensi gejala yang diukurinya. Data-data angka hasil pengukuran kemudian dianalisis.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh SMK di Indonesia, namun karena keterbatasan yang ada dengan tetap memperhatikan keterwakilan seluruh provinsi, maka dalam memilih SMK yang dijadikan sampel penelitian digunakan teknik pengambilan sampel bertingkat/bertahap (*multiple stage sample*). Tahap pertama dipilih 20 provinsi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia didasarkan pada jumlah SMK yang ada di provinsi tersebut.

Selanjutnya, pada tahap kedua, dari masing-masing provinsi tersebut dipilih secara acak 1 kabupaten/kota yang akan dijadikan sebagai sampel. Tahap 3, secara *purposive sampling* di masing-masing kabupaten/kota dipilih 7 SMK berdasarkan kriteria, baik, sedang, dan kurang sebagai sampel penelitian. Oleh karena jumlah sekolah di beberapa daerah terbatas, maka khusus Kabupaten Limapuluh Kota hanya dipilih 6 SMK dan Kabupaten Maluku Tenggara diambil 5 SMK. Studi ini dilaksanakan pada tahun 2011.

Teknik Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu kuesioner. Responden yang dipilih diambil dari para pengambil kebijakan/pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan, yaitu kepala SMK atau yang mewakili dengan total 137 orang dari 20 kabupaten/kota di Indonesia.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif sederhana, yaitu dengan menjumlahkan tanda centang yang diisi oleh kepala sekolah, kemudian dicari besarnya persentase masing-masing kategori untuk menarik kesimpulan akhir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari kepala sekolah SMK, diketahui bahwa

Tabel 1. Sampel Responden

No	Provinsi	Kabupaten/kota dan Jumlah SMK	Jumlah responden
1.	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon (3 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
2.	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap (2 SMK Baik; 3 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
3.	Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro (2 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
4.	DI Yogyakarta	Kabupaten Gunung Kidul (2 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
5.	Sumatera Barat	Kabupaten Limapuluh Koto (2 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	6
6.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir (2 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
7.	Sumatera Utara	Kabupaten Langkat (2 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
8.	Lampung	Kabupaten Tulang Bawang (2 SMK Baik; 3 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
9.	Bangka Belitung	Kabupaten Pangkal Pinang (3 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
10.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong (2 SMK Baik; 3 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
11.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Palangkaraya (2 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
12.	Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara (1 SMK Baik; 3 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
13.	Riau	Kabupaten Pekanbaru (3 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
14.	NTB	Kabupaten Sumbawa Barat (2 SMK Baik; 3 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
15.	Bali	Kabupaten Buleleng (3 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
16.	Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara (2 SMK Baik; 1 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	5
17.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Utara (1 SMK Baik; 3 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
18.	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari (3 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
19.	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Selatan (2 SMK Baik; 3 SMK Sedang; dan 2 SMK Kurang)	7
20.	Papua Barat	Kota Sorong (2 SMK Baik; 2 SMK Sedang; dan 3 SMK Kurang)	7
Jumlah			137

sebagian besar kepala sekolah SMK sudah mengetahui kebijakan RPJM yang berkaitan dengan Pendidikan Karakter, Pendidikan Ekonomi Kreatif, dan Pendidikan Kewirausahaan. Demikian pula, sebagian sekolah juga telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan menerapkan metode pembelajaran aktif di sekolah masing-masing. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan dari pemahaman kepala sekolah terhadap kebijakan dan pelaksanaannya di sekolah.

Tingkat Pemahaman Kepala Sekolah terhadap Kebijakan Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewirausahaan, dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan informasi kepala sekolah SMK, diketahui bahwa hampir semua responden (98%) telah memahami kebijakan pendidikan karakter. Beberapa SMK yang belum mengetahui tentang kebijakan tersebut terdapat di Kabupaten Halmahera Utara, Sumbawa Barat dan Aceh Tenggara masing-masing 1 sekolah. Sumber informasi tentang kebijakan tersebut diperoleh oleh para kepala sekolah dari berbagai sumber

yang cukup bervariasi, yakni dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota 85%, Puskurbuk (51%), P4TK (47%), Direktorat (45%), dan LPMP (41%).

Sosialisasi

Sekolah-sekolah yang sudah mengetahui kebijakan ini, sebagian besar (86%) sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai bentuk kepada warga sekolah. Sosialisasi kebijakan ini paling dominan sebesar (84%) dilakukan melalui rapat guru, diikuti dengan sosialisasi melalui kegiatan upacara, rapat komite sekolah, penempelan informasi di papan pengumuman dan menyebarkan surat edaran.

Komitmen Program dan Pemilihan Dokumen

Komitmen warga sekolah dan perencanaan program sangat menentukan keberhasilan program pendidikan karakter. Terkait dengan itu, ada sebanyak 88% SMK yang sudah membuat komitmen untuk melaksanakan pendidikan karakter dan ada 86% yang telah memasukan pendidikan karakter ke dalam program sekolah, namun baru 59% yang merealisasikan ke dalam dokumen sekolah.

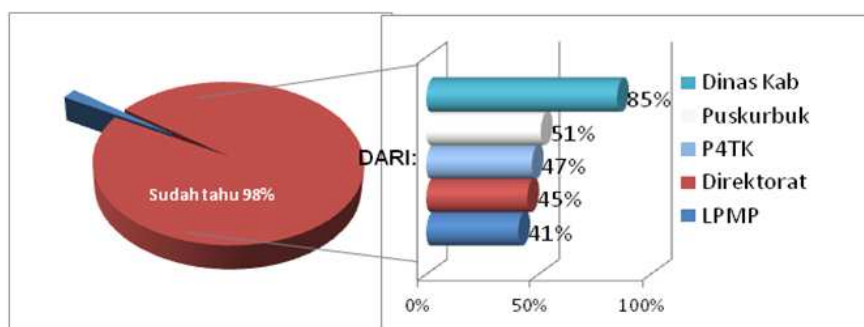


Diagram 1. Pengetahuan Kepala Sekolah tentang Kebijakan dan Sumber Informasi

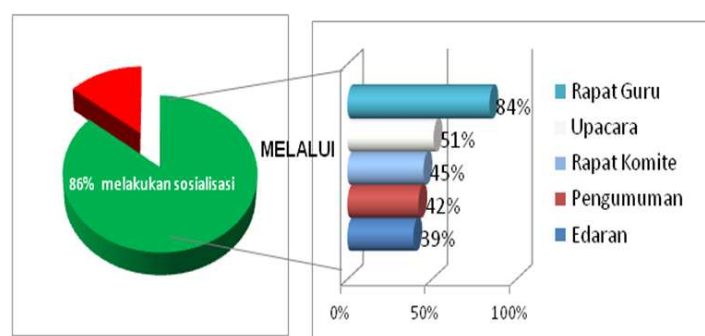


Diagram 2. Bentuk Sosialisasi Kebijakan Karakter

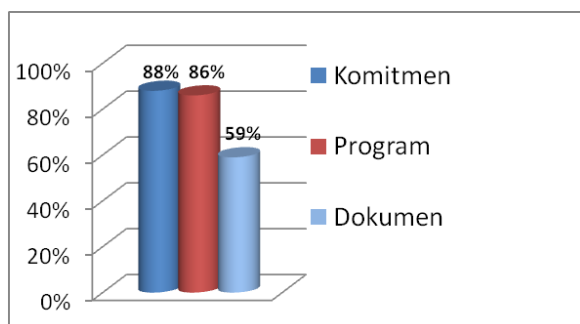


Diagram 3. Komitmen, Program, dan Dokumen Pendidikan Karakter

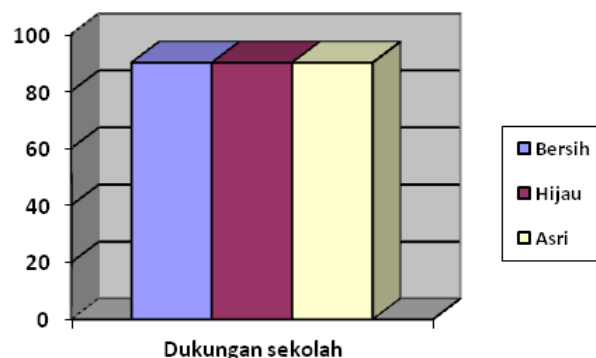


Diagram 5. Dukungan Sekolah

Penentuan Nilai-nilai

Dari sebagian besar kepala sekolah yang sudah membuat komitmen dan program bersama tersebut, sebagian besar, yaitu 89% menyatakan penetapan nilai-nilai dilakukan melalui kesepakatan kepala sekolah dan warga sekolah, 64% menyatakan mengikuti instruksi dari dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan sebanyak 54% menyatakan hasil dari analisis konteks.

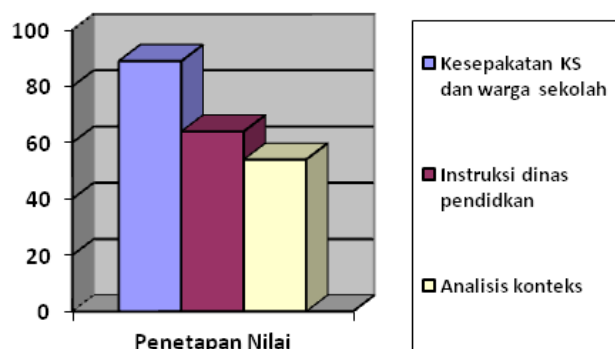


Diagram 4. Cara Menentukan Nilai yang Diprioritaskan

Dukungan Sekolah

Dukungan sekolah melalui penyediaan sarana fisik yang bersih, hijau dan asri sudah baik, yaitu mencapai lebih dari 90% sekolah yang menjadi responden

Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (KWu & EK)

Kebijakan pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif (KWu & EK) sudah diketahui oleh sebagian besar kepala sekolah (88%). Namun, pendalaman dengan membaca langsung Inpres Nomor 6 Tahun 2009 baru dilakukan oleh sebagian kepala sekolah (46%), sehingga penyebaran kebijakan dan perencanaan di sekolah masih kurang (54%). Pemahaman terhadap konten pendidikan Kwu & EK dinilai sudah baik dan satu sama lain memiliki persepsi yang sama.

Belajar Aktif

Kebijakan tentang belajar aktif, kreatif dan menyenangkan (BAKM) sudah diketahui oleh hampir semua responden hanya satu responden yang menyatakan belum mengetahui. Dinas kab/kota paling banyak memberikan dukungan pelaksanaan BAKM melalui pelatihan, sementara sekolah juga mempunyai inisiatif yang cukup tinggi untuk mengembangkan kemampuan gurunya.

Kebijakan pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif maupun belajar aktif, kreatif, dan menyenangkan (BAKM) sebagian sudah dipahami oleh hampir semua kepala sekolah, namun sumber tempat informasi diperoleh dan tingkat pemahaman yang dimiliki berbeda. Kepala sekolah memperoleh informasi tentang Pendidikan Karakter dan BAKM paling banyak didapat dari dinas pendidikan kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi ditingkat sekolah melalui rapat dewan guru. Materi pertama yang dikembangkan oleh Puskurbuk maupun oleh direktorat teknis terkait yaitu materi

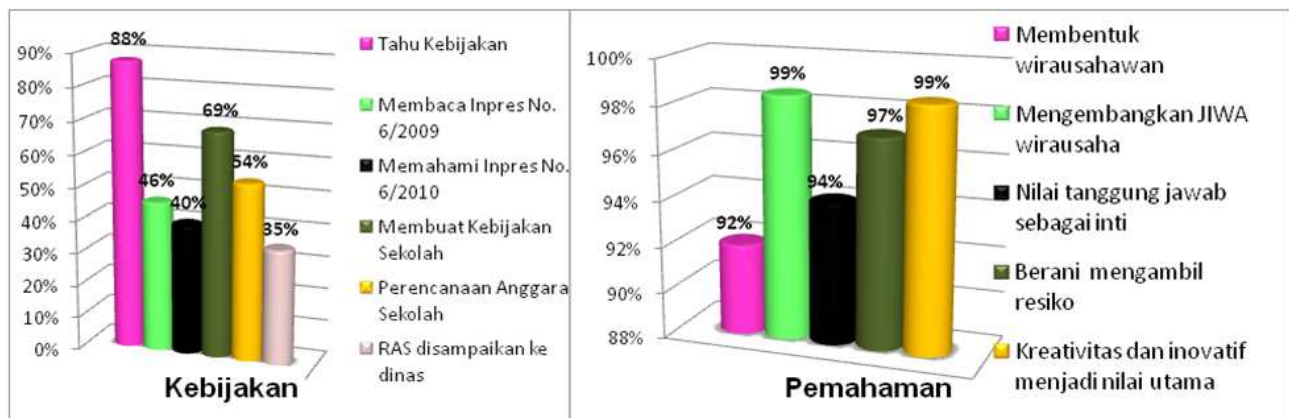


Diagram 6. Kebijakan Kewirausahaan (KWU) dan Ekonomi Kreatif (EK)

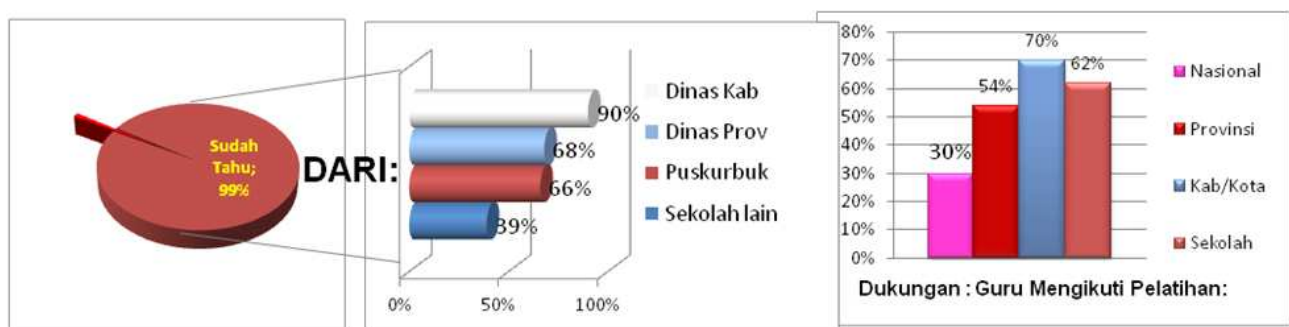


Diagram 7. Kebijakan

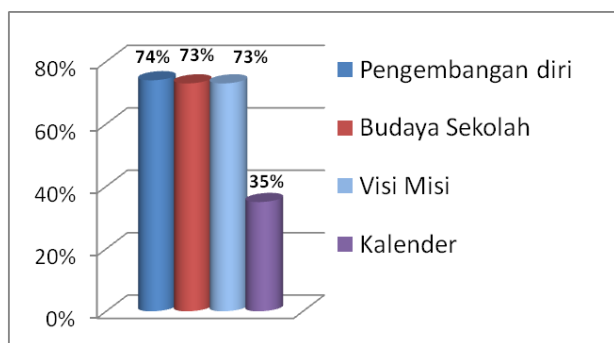
pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, sehingga hampir dalam setiap kegiatan pendampingan pembuatan KTSP selalu disertai dengan bahan pendidikan karakter dan BAKM yang cukup bervariasi. Sebagian besar kegiatan tersebut juga diikuti dengan pembuatan komitmen bersama untuk menjalankan pendidikan karakter dalam bentuk perencanaan program-program kegiatan oleh sebagian kepala sekolah dan warga sekolah. Sehingga tingkat pemahaman kepala sekolah dan warga sekolah cukup baik. Selain itu dukungan dari dinas pendidikan kabupaten/kota dalam bentuk pelatihan BAKM dan inisiatif sekolah untuk mengembangkan kemampuan gurunya juga cukup tinggi.

Materi pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif dikembangkan lebih lanjut oleh Puskurbuk sesudah materi pendidikan karakter, sehingga materi yang disampaikan pada saat bintek kurang bervariasi. Hal ini ditambah dengan kepala sekolah mencoba memahami informasi bukan melalui membaca langsung Inpres Nomor

6 Tahun 2009 atau sumber informasi lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda dalam mengimplementasikannya di sekolah. Hal ini diikuti pula dengan belum dibuatnya komitmen bersama oleh sebagian besar responden tentang penerapan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif diimplementasikan melalui belajar aktif di sekolah.

Bentuk-Bentuk Implementasi Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

Sebagian besar sekolah memasukkan pendidikan karakter ke dalam dokumen KTSP pada bagian pengembangan diri yang dinyatakan oleh 74% responden, sedangkan masing-masing 73% responden mengintegrasikannya ke dalam budaya sekolah dan visi misi sekolah, sementara yang memasukkan ke dalam kalender pendidikan paling sedikit, yaitu sebanyak 35% sekolah.



Gambar 8. Bentuk Integrasi Pendidikan Karakter

Hampir semua responden menyatakan pendidikan karakter bermanfaat untuk membuat perubahan perilaku (96% responden) dan 95% responden menempatkan nilai disiplin merupakan nilai yang paling banyak dikembangkan, sedangkan nilai inovatif merupakan nilai yang paling sedikit dikembangkan, yang dinyatakan oleh 72% responden. Hasil dari pendidikan karakter ini, baru sebanyak 36% responden yang sudah

menyatakan membudaya, rata-rata baru menyatakan mulai terlihat dan berkembang. Untuk kota Kendari terdapat 5 sekolah yang menyatakan belum terlihat hasilnya.

Pelaksanaan pendidikan karakter banyak dilakukan dengan cara membudayakan senyum, sapa, salam, sopan sebanyak 93% dan paling sedikit melalui penambahan alokasi waktu sebanyak 28% yang lain dilaksanakan dalam bentuk keteladanan 87%, kegiatan rutin 76%, kegiatan spontan 68%, pengkondisian 73%, ekskul 76%.

Pendidikan karakter di satuan pendidikan dikondisikan melalui upacara bendera sebanyak 93%, dan yang terendah adalah melalui penyediaan kotak penemuan barang hilang hanya 33%.

Semenjak adanya program pendidikan karakter ini, perubahan karakter yang paling banyak terlihat ada pada peserta didik (95%), walaupun tidak terpaut jauh dengan pendidik dan tenaga kependidikan (93%).

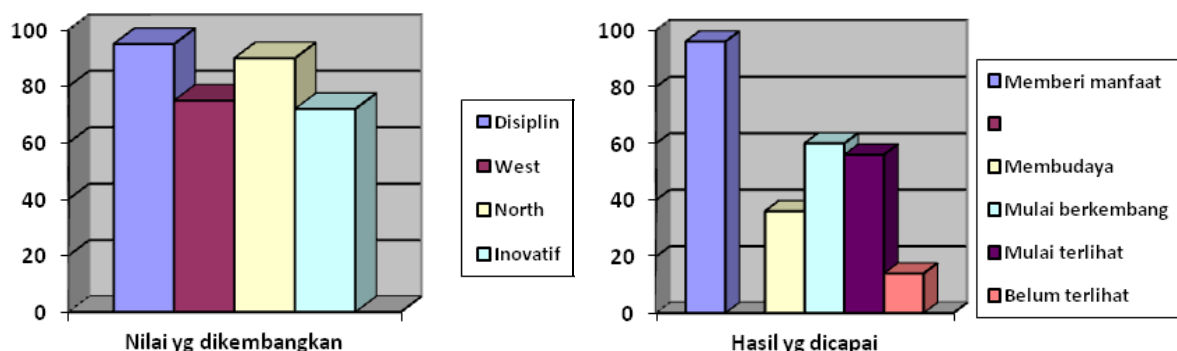


Diagram 9. Manfaat Pendidikan Karakter

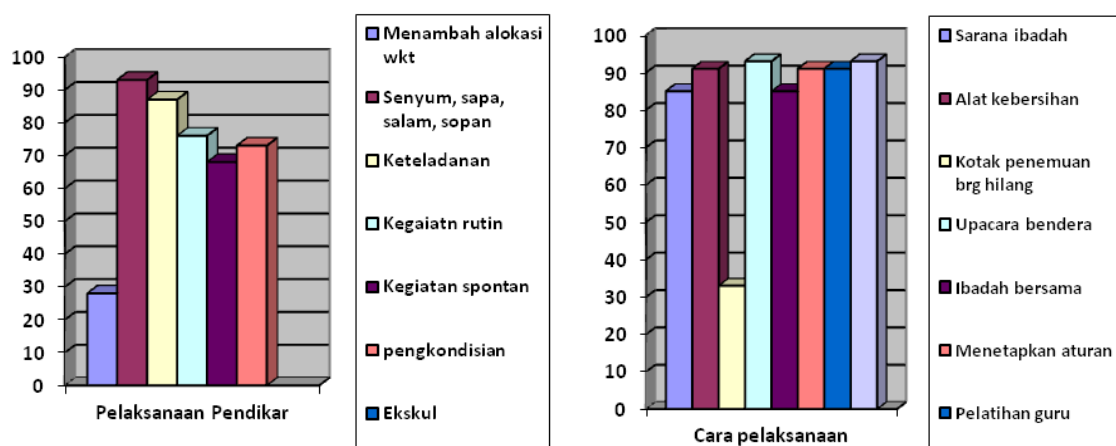


Diagram 10. Cara Melaksanakan

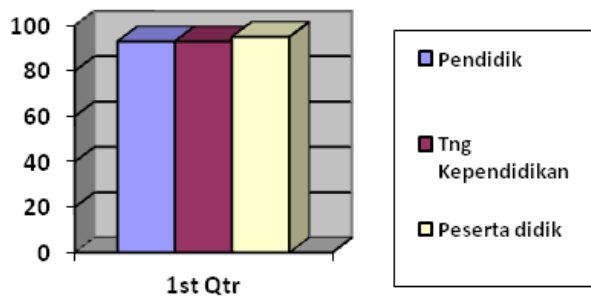


Diagram 11. Tingkat Perubahan Karakter Warga Sekolah

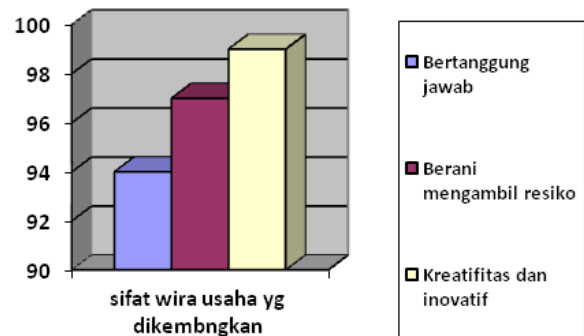


Diagram13. Nilai-nilai yang Dikembangkan

Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (KWu & EK)

Jumlah SMK yang mengintegrasikan pendidikan KWu & EK ke dalam dokumen KTSP sudah cukup tinggi, akan tetapi pengaruhnya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik tentang pendidikan KWu & EK, masih rendah. Responden menyatakan bahwa untuk menghasilkan produk kreatif, hambatan utamanya adalah keterbatasan dana (77%) dan sarana prasarana (74%). Karena responden berasumsi pendidikan Kwu & EK di SMK adalah untuk menghasilkan peserta didik-peserta didik yang dapat menghasilkan produk kreatif.

Dari 94% responden yang menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk mengembangkan jiwa wirausaha, menginformasikan bahwa sifat-sifat yang dikembangkan adalah bertanggungjawab (94%) dan berani mengambil resiko (97%). Serta kreativitas dan inovatif (99%).

Strategi untuk mengintegrasikan Pendidikan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif ke dalam kurikulum dilaksanakan melalui RPP dan Silabus dinyatakan oleh 76% responden, sedangkan pelaksanaannya dengan mengintegrasikannya ke dalam pengembangan diri dinyatakan oleh 74% kepala sekolah, sebagian menyatakan dilaksanakan dalam kegiatan unit produksi (UP SMK), kantin kejujuran, dan koperasi sekolah dinyatakan oleh 85%.

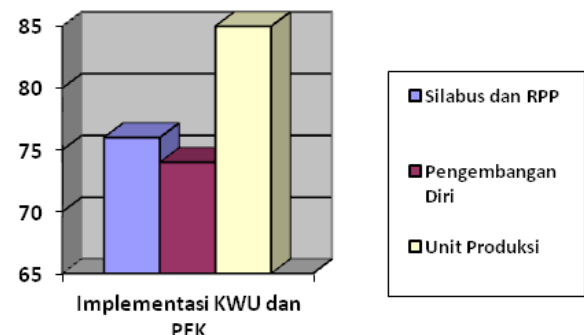


Diagram 14. Bentuk Implementasi

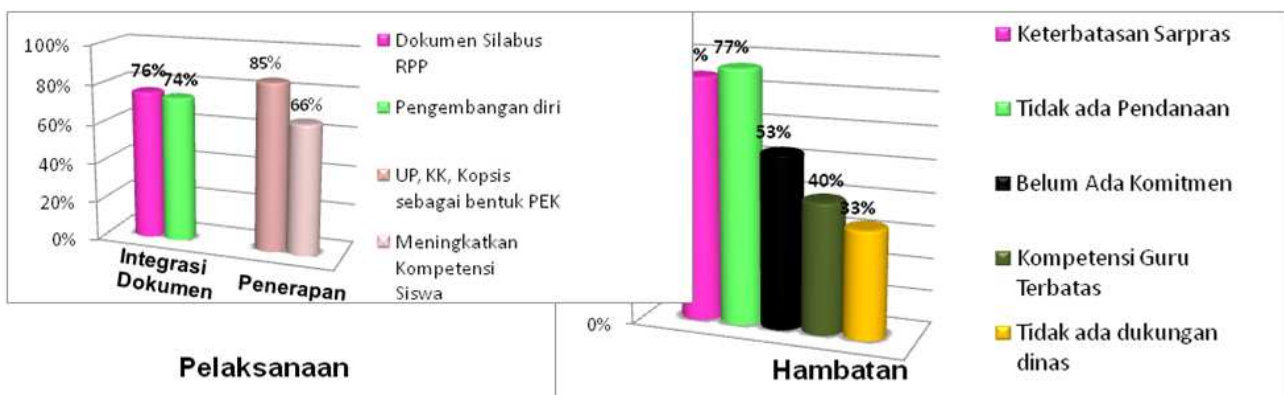


Diagram 12. Pelaksanaan di Sekolah

Baru sekitar 62% guru-guru menyusun dan menerapkan rancangan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dan ekonomi kreatif. sedangkan sekitar 66% peserta didik mampu membuat proposal untuk mendirikan usaha/bisnis, dan sekitar 55% peserta didik berlatih untuk membuka usaha baru yang berorientasi pada profit.

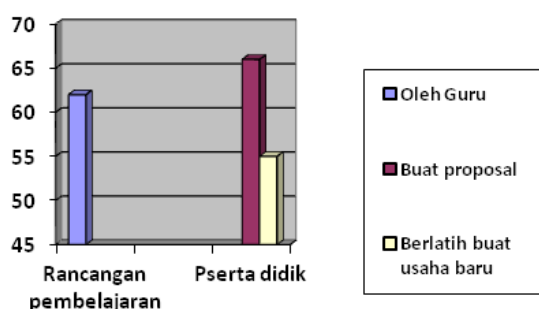


Diagram 15. Tingkat Pelaksanaan

Belajar Aktif

Pelaksanaan BAKM umumnya sudah baik, dimulai dari perencanaan mengajar berupa silabus dan RPP sudah bernuansa belajar aktif. Hal inipun tampak dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Hambatan terbesar berasal dari peserta didik 61% dan SDM guru 58%, sehingga responden menyatakan perlu meningkatkan efektivitas diklat.

Nilai-nilai yang diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan karakter, sangat bervariasi, namun yang paling banyak dikembangkan adalah nilai disiplin dan 5 s (senyum, salam, sapa, santun, dan sopan). Nilai disiplin dan 5 s ini, lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk keteladanan,

sedangkan yang paling sedikit dikembangkan yaitu nilai inovatif. Hal ini kemungkinan karena sulitnya mengubah cara guru menempatkan diri menjadi bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga ada kecenderungan peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk membuat sesuatu hal yang bersifat baru. Namun demikian, pendidikan karakter sudah menunjukkan manfaatnya karena sudah terlihat perubahan perilaku warga sekolah, meskipun perubahan perilaku lebih banyak terlihat pada peserta didik.

Nilai-nilai dalam pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan ekonomi kreatif yang paling banyak dikembangkan yakni tanggung jawab, berani mengambil resiko, kreativitas dan inovatif. Sebagian besar kepala sekolah beranggapan pendidikan kewirausahaan ditekankan untuk membentuk peserta didik menjadi seorang wirausahawan, walaupun sebenarnya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai wirausaha seperti kerja keras, kerja prestatif, dll.

Sebagian besar kepala sekolah menyatakan hambatan utama dalam menjalankan pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif yaitu dana dan sarana prasarana. Sebagian responden menyatakan perlunya peningkatan efektivitas Diklat guru, karena SDM guru masih rendah.

Pelaksanaan BAKM umumnya sudah baik mulai dari perencanaan dalam bentuk silabus dan RPP, penggunaan metode yang bervariasi, merancang sumber belajar secara beragam, merancang pengelolaan kelas yang bervariasi, serta merancang penilaian dengan jenis penilaian yang berbeda yang disesuaikan dengan KD. Dalam penerapan silabus dan RPP hanya sebagian menggunakan buku sumber yang berasal dari Puskurbuk.

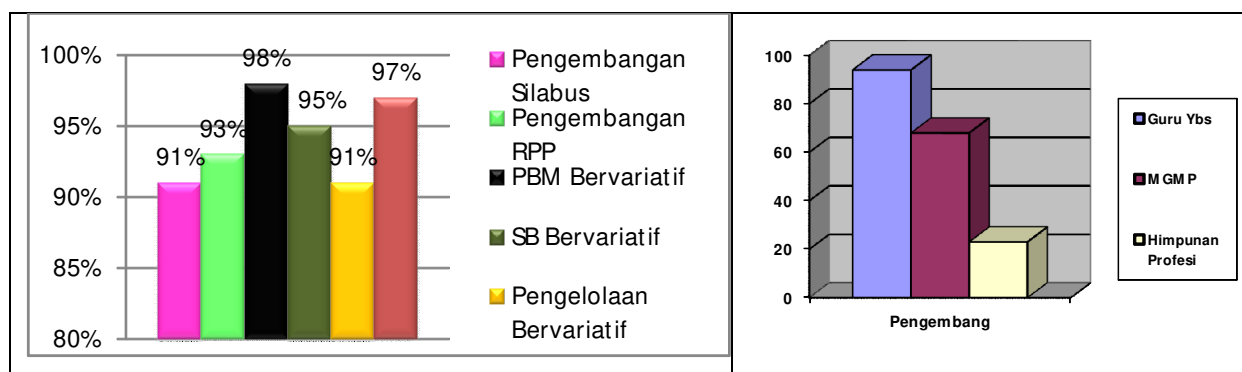


Diagram 16. Hambatan Pelaksanaan

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil studi dan pembahasan, dapat ditarik simpulan bahwa kebijakan pendidikan karakter, pendidikan ekonomi kreatif dan pendidikan kewirausahaan telah dipahami dan ditindaklanjuti secara bertahap dan berkesinambungan oleh sebagian besar instansi pendidikan di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun oleh satuan pendidikan.

Hal ini terlihat dari komponen kebijakan pada pendidikan karakter yang tergambar sebagai berikut: 1) hampir seluruh responden sudah mengetahui dan sudah melakukan sosialisasi ke guru-guru di sekolah yang diikuti dengan pembuatan komitmen bersama dan penyediaan sarana penunjang untuk pembelajaran pendidikan karakter bangsa; 2) pada pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Informasi tersebut didukung oleh sebagian besar responden yang sudah mengetahui walaupun keinginan untuk lebih mendalaminya masih belum optimal. Dalam hal belajar aktif kreatif dan menyenangkan terlihat sebagian besar responden sudah menyadari pentingnya untuk dilaksanakan, sehingga baik di tingkat kabupaten/kota maupun sekolah sudah berusaha meningkatkan kemampuan gurunya untuk melaksanakan metode BAKM. Hal ini menunjukkan bahwa model sosialisasi *The Proliferation of Centres* yang dikembangkan lebih lanjut oleh Puskurbuk dalam rangka menyebarkan kebijakan pendidikan karakter, pendidikan ekonomi kreatif dan pendidikan kewirausahaan sudah cukup baik, sekalipun masih perlu pengembangan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan pembelajaran.

Dalam komponen pelaksanaan; sekolah sudah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pengembangan diri, budaya sekolah dan penanaman visi-misi sekolah. Disisi lain, walaupun sebagian besar menyatakan pendidikan karakter bermanfaat untuk mengubah perilaku peserta didik, namun sangat sedikit yang mengagendakannya dalam bentuk-bentuk kegiatan di dalam kalender pendidikan; pendidikan kewirausahaan dan ekonomi kreatif sudah dilaksanakan di SMK meskipun belum banyak variasi; Pada pelaksanaan BAKM pada umumnya sudah mulai dilakukan, namun masih ditemukan hambatan utama yaitu kurangnya kompetensi guru dalam mengimplementasikannya.

Saran

Sosialisasi kebijakan pendidikan karakter, pendidikan ekonomi kreatif, dan pendidikan kewirausahaan dengan model *The Proliferation of Centres* perlu diteruskan dan bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kebijakan pendidikan lainnya karena telah didukung oleh bukti-bukti yang telah teruji dan sudah menunjukkan keberhasilannya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan, para guru perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran, baik dalam mengintegrasikan kebijakan pendidikan karakter, pendidikan ekonomi kreatif, dan pendidikan kewirausahaan ke dalam mata pelajaran, muatan lokal, maupun pengembangan diri. Oleh karena itu, kekurangan kompetensi guru itu perlu ditindaklanjuti melalui diklat-diklat tentang bagaimana menggunakan beberapa macam metoda mengajar melalui *inservice training* maupun *onservice training*.

Pustaka Acuan

Anonim. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Penduduk Miskin September 2012: 28,59 juta orang*. <http://www.bps.go.id/?news=970> diunduh Sabtu 6 April 2013

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Naskah akademik pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*. Puskurbuk

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan

- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33/MPN/SE/2007, *Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2000. *Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum SMK*
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2025*.
- Hasan, Hamid. 2010. Makalah dalam Workshop Analisis Konteks di Cisarua Bogor
- Irawan. 2002. *Logika & Prosedur Penelitian*. STIA-LAN Press Jakarta
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif
- Howkins, John. 2002. *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin UK
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2012. *Penduduk Indonesia 251 juta, Jabar Terbesar, Pabar Terkecil*. http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7299&Itemid=1._ diunduh Jumat, 5 April 2013
- Iskandar, Muhaimin. 2011. *Angkatan Kerja Bakal Jadi 119.39 Juta* <http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/tahun-2012-angkatan-kerja-bakal-jadi-11939-juta/15290>. diunduh Jumat 8 Juni 2012
- Meredith, Geoffresy G. 1996. *Kewirausahaan*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*.
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2011. *Laporan Monitoring dan Evaluasi 2011*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Nasional
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan. 2010. *Desain Induk Pendidikan Karakter*
- Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan. 1996. *Pendekatan Belajar Aktif (CBSA), Konsep dan Pelaksanaannya*.
- Pusat Kurikulum. 2000. *Model Pengembangan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum: Strategi Penyampaian (delivery) dan Pemantauan Kurikulum*. Balitbang, Jakarta.
- Pusat Kurikulum. 2005. *Jaringan Kurikulum*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta
- Rahmat, Jalaluddin. 2007. *Belajar Cerdas, Belajar Berbasis Otak*, Bandung: MLC
- Soedarsono Soemarno. 2008. *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa, Peran Penting Karakter dan Hasrat untuk Berubah*. PT Elex Media Komputindo, Palmerah Selatan Jakarta
- Syarief Hasan. 2012. *Jumlah Wirausahawan Indonesia*. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/red/322681-menkop-jumlah-wirausahawan-Indonesia>. diunduh Jumat 8 Juni 2012
- Soesarsono. 2002. *Pengantar Kewirausahaan*, Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor
- Suryana. 2004. *Memahami Karakteristik Kewirausahaan*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

- Siagian, Salim dan Asfahani. 1995. *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17.8.45*. Kloang Klede Jaya PT Putra Timur bekerja sama dengan Puslatkop dan PK Depkop dan PPK. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. "Pengertian Karakter" ([http://id.wikipedia.org/wiki /Karakter](http://id.wikipedia.org/wiki/Karakter)) diunduh 4 Oktober 2012.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional